

Analisis Kinerja Manajemen Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten

Rahmawati Riantisari^{1✉}, Alfiati Nurrokhmini², Noviadry Nur Tamtama³

(1, 3) Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Klaten, Indonesia

(2) Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Klaten, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kemandirian fiskal daerah yang tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Klaten memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, struktur, dan kinerja pengelolaan PAD Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data time series tahun 2020–2024 yang dianalisis melalui rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Klaten cenderung meningkat, namun masih berfluktuasi sehingga belum stabil. Struktur PAD mengalami pergeseran dari dominasi lain-lain PAD menuju pajak dan retribusi daerah, tetapi perubahan tersebut belum konsisten. Dari sisi kinerja, PAD tergolong efektif karena realisasi selalu melampaui target, namun belum efisien karena pengeluaran daerah jauh lebih besar dibandingkan PAD. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah, yang menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kesimpulannya, peningkatan PAD belum diikuti oleh kualitas pengelolaan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan struktur pendapatan yang lebih stabil, peningkatan efisiensi pengelolaan, serta pengurangan ketergantungan terhadap sumber pendapatan eksternal guna mendukung kemandirian fiskal daerah.

Abstract: This study is motivated by the importance of regional fiscal independence, which is reflected in the ability of local governments to manage Regional Original Revenue (PAD). Klaten Regency has considerable economic potential; however, the contribution of PAD to total regional revenue remains relatively low. This study aims to analyze the development, structure, and management performance of PAD in Klaten Regency. The method used is a descriptive quantitative approach employing time series data from 2020 to 2024, analyzed using effectiveness, efficiency, and independence ratios. The results show that PAD in Klaten Regency tends to increase but remains fluctuating and therefore not yet stable. The structure of PAD has shifted from the dominance of other legitimate revenues toward local taxes and retributions, although this change has not been consistent. In terms of performance, PAD is considered effective as its realization consistently exceeds the target; however, it is not yet efficient because regional expenditures are significantly higher than PAD. In addition, the level of regional financial independence is still very low, indicating a high dependence on central government transfers. In conclusion, the increase in PAD has not been accompanied by optimal management quality. Therefore, efforts are needed to strengthen a more stable revenue structure, improve management efficiency, and reduce dependence on external revenue sources in order to enhance regional fiscal independence.

Article History:

Received: 29 April 2026

Revised: 9 June 2026

Accepted: 11 June 2026

Published: 19 June 2026

Kata kunci:

Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian Fiskal

Keywords:

Regional Original Revenue (PAD), Regional Financial Performance, Effectiveness, Efficiency, Fiscal Independence

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



How to cite: Riantisari, R., Nurrokhmini, A., & Tamtama, N. N. (2026). Analisis Kinerja Manajemen Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 4(2), 246–257. <https://doi.org/10.70716/emis.v4i2.497>

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di era otonomi daerah ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang ditransfer dari pusat, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk mengelola pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan. Artinya, daerah yang mampu menggali dan mengelola sumber pendapatannya sendiri akan lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya, tanpa terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang baik cenderung memiliki kebijakan publik yang lebih efektif dan kinerja ekonomi regional yang lebih stabil (Syahrini et al., 2025). Dalam menilai tingkat kemandirian fiskal tersebut, diperlukan gambaran empiris mengenai struktur dan sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam menilai tingkat kemandirian fiskal tersebut, struktur dan sumber pendapatan daerah menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji. Struktur pendapatan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai pembangunan dari sumber pendapatan sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer (Hasanah et al., 2025)(Poniatowicz & Wildowicz-szumarska, 2024). Dengan kata lain, semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah dibandingkan dana transfer, maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pemahaman yang komprehensif mengenai komposisi pendapatan daerah menjadi dasar penting dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemahaman ini juga membantu pemerintah dalam menentukan strategi peningkatan pendapatan yang lebih tepat sasaran, misalnya dengan mengoptimalkan sektor yang memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal.

Dalam konteks kemandirian fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai indikator utama (Wijaya et al., 2025) (Saruni et al., 2025). PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya (Sartika et al., 2025)(Warti et al., 2025). Keempat komponen ini pada dasarnya mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut, sehingga semakin berkembang aktivitas ekonomi, seharusnya semakin besar pula potensi PAD yang dapat diperoleh. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD terhadap total anggaran menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang mencerminkan peranan PAD dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal (Fauji & Syafitri, 2024). Tuwaidan et al., (2024) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemandirian fiskal daerah. PAD tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada peningkatan indeks kesejahteraan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat (Wibisono et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan program pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Namun demikian, Sejumlah studi menunjukkan bahwa potensi ekonomi lokal yang tinggi tidak selalu diikuti oleh optimalisasi PAD (Zarkasi et al., 2024). Fluktuasi pada komponen PAD dan variasi kapasitas fiskal antar daerah menjadi bukti bahwa kemampuan daerah mengelola potensi ekonominya secara efektif masih terbatas, sehingga potensi ekonomi tidak selalu tercermin dalam realisasi PAD yang optimal(Shafwah et al., 2024)(Zakaria & Syahputra, 2022). Kondisi ini sering terjadi karena adanya kendala seperti lemahnya sistem pemungutan pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta belum optimalnya pengelolaan aset daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan PAD perlu menekankan efektivitas dan kontribusinya terhadap kinerja keuangan dan ekonomi daerah, bukan semata besarnya potensi. Dalam perspektif manajemen keuangan, PAD dipahami sebagai hasil pengelolaan pendapatan yang menekankan efektivitas realisasi dan kontribusinya terhadap kinerja daerah. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pendapatan daerah berkaitan erat dengan efisiensi belanja dan kinerja ekonomi, sehingga analisis PAD perlu dilakukan

secara terukur untuk menilai tingkat optimalisasinya dalam mendukung pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan PAD tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah pendapatan, tetapi juga pada bagaimana pendapatan tersebut dikelola secara efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kabupaten Klaten, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata. Hal ini mencerminkan potensi ekonomi lokal yang sangat besar. Keberagaman sektor ini seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui berbagai sumber, baik dari pajak, retribusi, maupun pengelolaan potensi wisata dan industri lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan laporan keuangan daerah Kabupaten Klaten, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah masih relatif rendah. Pada tahun 2025, PAD tercatat sekitar Rp415,78 miliar atau 14,67% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2,83 triliun, sedangkan dana transfer dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp1,57 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat, sehingga ruang gerak pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan menjadi relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Klaten masih relatif rendah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten, sementara retribusi daerah, jumlah wisatawan dan belanja modal belum memberikan kontribusi optimal (Riantisari et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa sektor potensial, khususnya pariwisata dan retribusi daerah, masih belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber peningkatan PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan PAD di Kabupaten Klaten tidak hanya terkait potensi ekonomi, tetapi juga efektivitas pengelolaannya.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa optimalisasi dan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi isu penting dalam keuangan daerah. Studi di Jawa Timur menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pajak daerah dan retribusi relatif baik, kontribusinya terhadap PAD masih bervariasi antar daerah dan belum sepenuhnya mencerminkan potensi ekonomi lokal (Febriana & Galuh, 2025). Artinya, meskipun target penerimaan dapat tercapai, hal tersebut belum tentu menunjukkan bahwa seluruh potensi daerah telah dimanfaatkan secara optimal. Temuan serupa juga ditunjukkan dalam studi Kota Surabaya yang menekankan bahwa efektivitas PAD tidak selalu diikuti oleh peningkatan kemandirian fiskal apabila struktur pendapatan masih didominasi oleh dana transfer pusat (Faradilla & Hanifa, 2024). Selain itu, penelitian empiris juga menemukan bahwa efektivitas komponen PAD tertentu tidak selalu diikuti oleh kontribusi yang signifikan terhadap PAD secara agregat, sehingga optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah masih menjadi persoalan struktural (Rifa & Ismunawan, 2025). Sejumlah studi terbaru kemudian menekankan perlunya inovasi kebijakan, perbaikan manajemen, dan penguatan koordinasi antar instansi sebagai prasyarat peningkatan efektivitas dan optimalisasi PAD secara berkelanjutan (Fathurrahman et al., 2024)(Pattilouw, 2023).

Namun demikian, sebagian besar kajian terdahulu masih menempatkan PAD sebagai variabel pendukung dalam analisis kinerja keuangan atau pertumbuhan ekonomi secara umum, sehingga kajian yang secara khusus memotret dinamika pengelolaan PAD dan kinerja ekonomi daerah secara mendalam pada satu wilayah kabupaten masih terbatas. Penelitian tersebut lebih menekankan hubungan antar variabel, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh bagaimana struktur, perkembangan, dan pengelolaan PAD dalam kinerja keuangan daerah. Selain itu, kajian yang menganalisis struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi tiap komponennya secara deskriptif masih terbatas, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Padahal, analisis ini penting untuk mengetahui sumber pendapatan yang dominan serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pengujian hubungan antarvariabel yang memengaruhi PAD atau dampak PAD terhadap kinerja ekonomi daerah. Akibatnya, informasi mengenai bagaimana struktur PAD terbentuk, perkembangan masing-masing komponennya dari waktu ke waktu, serta

sejauh mana kontribusinya terhadap kemandirian fiskal daerah belum banyak dibahas secara mendalam, khususnya pada tingkat kabupaten. Padahal, pemahaman mengenai aspek-aspek tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah dan potensi peningkatan pendapatan yang dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mendeskripsikan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten melalui analisis struktur pendapatan, perkembangan komponen PAD, dan kaitannya dengan kondisi ekonomi daerah sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten selama periode 2020–2024; (2) bagaimana struktur dan kontribusi masing-masing komponen PAD dalam membentuk total PAD Kabupaten Klaten; (3) bagaimana kinerja pengelolaan PAD yang ditinjau dari rasio efisiensi dan efektivitas; serta (4) bagaimana tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Klaten yang tercermin dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Fokus kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan pengelolaan PAD Kabupaten Klaten sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian empiris yang menggambarkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan kinerja ekonomi daerah sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, khususnya terkait pentingnya kemandirian fiskal daerah dan belum optimalnya pengelolaan PAD. Langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah:

- 1) Langkah pertama dalam pemecahan masalah adalah mengidentifikasi struktur dan komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji kontribusi masing-masing komponen PAD, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD dan total pendapatan daerah.
- 2) Langkah kedua adalah menganalisis kinerja pengelolaan PAD melalui pengukuran tingkat efisiensi, efektivitas dan kemandirian PAD.

Penelitian dimulai dengan penetapan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara empiris kontribusi komponen PAD dan dinamika pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis dilakukan dengan pendekatan rasio kinerja keuangan daerah untuk menilai kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan merupakan data time series selama periode 2020-2024. Penelitian ini berfokus kontribusi komponen dan kinerja pengelolaan PAD. Indikator yang digunakan meliputi:

- 1) Kontribusi Komponen PAD:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-Lain PAD yang sah
- 2) Kinerja Pengelolaan PAD:
 - a. Rasio Efisiensi PAD
 - b. Rasio Efektivitas PAD
 - c. Rasio Kemandirian PAD

Tahap analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari BPS dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen APBD Kabupaten Klaten. Ketepatan data dijaga dengan membandingkan data dari berbagai sumber resmi serta memeriksa konsistensinya selama periode 2020–2024 sehingga data yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang baik. Analisis difokuskan pada pengukuran kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan rasio keuangan daerah. Kinerja pengelolaan PAD dalam penelitian ini dianalisis menggunakan tiga rasio keuangan daerah, yaitu rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas PAD, dan rasio kemandirian daerah. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung masing-masing rasio disajikan sebagai berikut.

1) Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi merupakan ukuran yang menunjukkan perbandingan antara hasil yang diperoleh (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*), atau antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah (Faradilla & Hanifa, 2024). Semakin rendah nilai rasio tersebut, maka tingkat efisiensi semakin baik, dan sebaliknya, semakin tinggi rasionya menunjukkan efisiensi yang semakin rendah.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori tingkat penilaian, yaitu sebagai berikut:

- Tidak efisien apabila nilai rasio lebih dari 100%.
- Efisien berimbang apabila nilai rasio tepat sebesar 100%.
- Efisien apabila nilai rasio kurang dari 100%.

2) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam APBD, dengan membandingkan hasil realisasi terhadap target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Faradilla & Hanifa, 2024).

$$\text{Rasio Efektiftas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Interpretasi Rasio Efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

- Nilai rasio < 100% menunjukkan bahwa realisasi belum mencapai target, sehingga dinilai kurang efektif.
- Nilai rasio = 100% menunjukkan bahwa realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan (efektif berimbang).
- Nilai rasio > 100% menunjukkan bahwa realisasi melampaui target, sehingga dinilai efektif.

3) Rasio Kemandirian PAD

Rasio kemandirian keuangan daerah atau desentralisasi fiskal menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan mengandalkan sumber pendapatan asli daerah (Oktaviani & Marini, 2023). Semakin besar total PAD terhadap total pendapatan daerah, maka rasio kemandirian keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat kapasitas keuangan daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat kemandiriannya, dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat rendah, apabila berada pada kisaran 0%–25%
- Rendah, apabila berada pada kisaran 25%–50%

- c. Sedang, apabila berada pada kisaran 50%–75%
- d. Tinggi, apabila berada pada kisaran 75%–100%

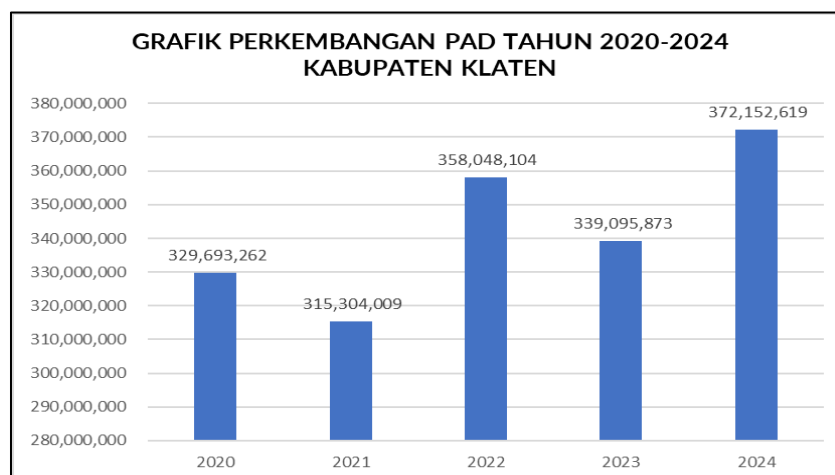
HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Bagian ini menyajikan hasil analisis kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten selama periode 2020–2024 dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis tidak hanya menggambarkan perkembangan PAD dari tahun ke tahun, tetapi juga melihat bagaimana kontribusi masing-masing komponen dalam membentuk total PAD. Selanjutnya, kinerja pengelolaan PAD dianalisis menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan, mengelola sumber daya secara optimal, serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

1. Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten selama periode tahun 2020-2024 disajikan pada bagian berikut sebagai gambaran umum kondisi pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Penyajian data ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana dinamika PAD yang terjadi, baik dari sisi peningkatan maupun fluktuasi, sehingga dapat memberikan pemahaman awal mengenai kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatannya.



Gambar 1. Grafik Perkembangan PAD Tahun 2020-2024 Kabupaten Klaten

Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar 329,69 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 315,30 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2022 PAD meningkat cukup signifikan menjadi 358,04 miliar, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penghimpunan pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2023 PAD kembali mengalami penurunan menjadi 339,09 miliar. Pada tahun 2024, PAD kembali meningkat dan mencapai 372,15 miliar, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode tersebut. Peningkatan PAD pada tahun 2024 juga didukung oleh kenaikan penerimaan retribusi daerah yang relatif lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan pelayanan publik yang menjadi objek retribusi.

2. Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten

Gambaran struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten diawali dengan penyajian data komponen PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD selama periode penelitian. Data ini menunjukkan komposisi masing-masing sumber pendapatan dalam membentuk total PAD. Selanjutnya, berdasarkan data tersebut dilakukan perhitungan kontribusi setiap komponen terhadap total PAD sehingga dapat diketahui peran dan dominasi masing-masing sumber pendapatan dalam struktur PAD Kabupaten Klaten.

Tabel 1. Komponen PAD Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

(dalam ribu rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengelolaan kekayaan yg Dipisahkan	Lain-Lain PAD yg Sah	Total PAD
2020	116,132,536	14,760,621	17,577,664	181,492,440	329,693,262
2021	126,672,231	14,405,349	16,409,075	157,817,354	315,304,009
2022	146,179,153	17,152,918	18,641,433	176,074,600	358,048,104
2023	165,852,621	18,784,805	21,741,481	132,716,966	339,095,873
2024	180,731,656	148,718,603	23,716,628	18,985,733	372,152,619

Berdasarkan data komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel 1, terlihat bahwa setiap sumber pendapatan memiliki besaran yang berbeda-beda dalam membentuk total PAD. Hal ini menunjukkan bahwa ada komponen yang perannya lebih besar dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, perlu dihitung kontribusi masing-masing komponen terhadap total PAD agar dapat diketahui seberapa besar peran setiap sumber pendapatan. Hasil perhitungan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Kontribusi Komponen PAD Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Tahun	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Kontribusi Retribusi Daerah (%)	Kontribusi Hasil pengelolaan kekayaan yg Dipisahkan (%)	Kontribusi Lain-Lain PAD yg Sah (%)
2020	35.22	4.48	5.33	55.05
2021	40.17	4.57	5.20	50.05
2022	40.83	4.79	5.21	49.18
2023	48.91	5.54	6.41	39.14
2024	48.56	39.96	6.37	5.10

Berdasarkan Tabel 2, kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten tahun 2020–2024 menunjukkan perubahan yang cukup jelas. Pada tahun 2020–2022, PAD didominasi oleh lain-lain PAD yang sah (55,05%; 50,05%; 49,18%), sementara pajak daerah meningkat dari 35,22% menjadi 40,83%. Kontribusi retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah relatif kecil dan stabil. Pada tahun 2023, pajak daerah menjadi kontributor terbesar (48,91%) dan lain-lain PAD menurun. Tahun 2024 menunjukkan perubahan mencolok dengan pajak tetap dominan (48,56%) dan retribusi meningkat signifikan menjadi 39,96%, sementara lain-lain PAD turun menjadi 5,10%. Secara umum, terjadi perubahan komposisi kontribusi PAD dari tahun ke tahun.

Perubahan komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur PAD Kabupaten Klaten belum sepenuhnya stabil dan masih mengalami pergeseran antar sumber pendapatan. Dominasi lain-lain PAD pada periode 2020–2024 mengindikasikan bahwa pada saat itu kontribusi PAD lebih banyak ditopang oleh pendapatan yang sifatnya tidak rutin. Kondisi ini kemudian mulai berubah pada tahun 2023 ketika

pajak daerah menjadi kontributor utama, yang menunjukkan adanya penguatan pada sumber pendapatan yang lebih berbasis aktivitas ekonomi daerah.

Namun demikian, perubahan yang terjadi pada tahun 2024 terlihat cukup drastis, khususnya pada peningkatan kontribusi retribusi daerah yang melonjak hingga 39,96%, disertai penurunan tajam lain-lain PAD. Pergeseran yang tidak bertahap ini menunjukkan bahwa struktur PAD masih bersifat fluktuatif dan belum terbentuk secara konsisten. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi pergeseran ke arah sumber PAD yang lebih utama, yaitu pajak dan retribusi daerah, kestabilan struktur pendapatan daerah masih perlu diperkuat agar dapat mendukung kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

3. Hasil Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten dilihat melalui analisis rasio keuangan daerah. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, mencapai target yang telah ditetapkan, serta tingkat kemandirian keuangan daerah. Rasio yang digunakan meliputi rasio efisiensi, efektivitas, dan kemandirian. Berikut perhitungan masing-masing rasio:

a. Hasil Analisis Rasio Efisiensi PAD Tahun 2020-2024 Kabupaten Klaten

Analisis rasio efisiensi digunakan untuk melihat seberapa baik Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengelola PAD dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Melalui perbandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dapat diketahui tingkat efisiensi pengelolaan PAD selama periode 2020–2024. Hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Rasio Efisiensi PAD Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pengeluaran (dalam ribu rupiah)	Realisasi Penerimaan PAD (dalam ribu rupiah)	Hasil (%)	Keterangan
2020	2,545,164,495	329,693,262	771.98	Tidak Efisien
2021	3,378,540,560	315,304,009	1,071.52	Tidak Efisien
2022	3,082,841,119	358,048,104	861.01	Tidak Efisien
2023	2,843,755,496	339,095,873	838.63	Tidak Efisien
2024	2,799,662,262	372,152,619	752.29	Tidak Efisien

Rasio efisiensi PAD Kabupaten Klaten tahun 2020–2024 berada pada kisaran 752,29%–1.071,52% dan semuanya masuk kategori tidak efisien. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021, sedangkan yang terendah pada tahun 2024. Meskipun setelah 2021 terlihat ada penurunan, angkanya masih jauh di atas 100%, yang artinya pengeluaran daerah masih jauh lebih besar dibandingkan pendapatan dari PAD. Jika mengacu pada kriteria penilaian, kondisi ini disebut tidak efisien karena nilai rasionya lebih dari 100%. Sementara itu, jika rasionya tepat 100% berarti seimbang, dan jika di bawah 100% baru bisa dikatakan efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa PAD belum mampu menjadi sumber utama dalam membiayai belanja daerah, sehingga ketergantungan terhadap sumber pendanaan lain, khususnya dana transfer dari pemerintah pusat, masih sangat tinggi. Sehingga dalam kasus ini, besarnya angka rasio menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah belum sebanding dengan kemampuan PAD dalam membiayainya, sehingga efisiensinya masih perlu ditingkatkan.

b. Hasil Analisis Rasio Efektivitas PAD Tahun 2020-2024 Kabupaten Klaten

Berikut disajikan hasil analisis rasio efektivitas PAD Kabupaten Klaten tahun 2020–2024. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan realisasi PAD terhadap target PAD setiap tahun. Nilai rasio kemudian

diinterpretasikan berdasarkan kriteria, yaitu kurang dari 100% berarti belum efektif, sama dengan 100% berarti berimbang, dan lebih dari 100% menunjukkan bahwa realisasi pendapatan telah melampaui target atau tergolong efektif.

Tabel 4. Hasil Rasio Efektivitas PAD Tahun 2020-2024

Tahun	Target PAD (dalam ribu rupiah)	Realisasi Penerimaan PAD (dalam ribu rupiah)	Hasil (%)	Keterangan
2020	246,558,797	329,693,262	133.72	Efektif
2021	277,915,341	315,304,009	113.45	Efektif
2022	329,129,378	358,048,104	108.79	Efektif
2023	326,447,398	339,095,873	103.87	Efektif
2024	364,905,905	372,152,619	101.99	Efektif

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa selama tahun 2020–2024, rasio efektivitas PAD Kabupaten Klaten selalu berada di atas 100%, sehingga dapat dikatakan efektif. Tahun 2020 menjadi yang paling tinggi dengan nilai 133,72%, yang berarti realisasi pendapatan jauh melampaui target. Setelah itu, nilainya perlahan menurun menjadi 113,45% (2021), 108,79% (2022), 103,87% (2023), dan 101,99% (2024). Meskipun menurun, semua nilainya tetap di atas 100%. Artinya, setiap tahun pemerintah daerah tetap mampu mencapai bahkan melampaui target PAD yang sudah ditetapkan.

c. Hasil Analisis Rasio Kemandirian PAD Tahun 2020-2024 Kabupaten Klaten

Bagian ini menyajikan hasil analisis rasio kemandirian PAD Kabupaten Klaten selama tahun 2020–2024. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan PAD dibandingkan total pendapatan yang dimiliki. Nilainya dihitung dari perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah. Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu sangat rendah (0–25%), rendah (25%–50%), sedang (50%–75%), dan tinggi (75%–100%). Melalui klasifikasi ini, dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah serta seberapa besar ketergantungannya terhadap pendapatan dari luar.

Tabel 5. Hasil Rasio Kemandirian PAD Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan Daerah (dalam ribu rupiah)	Realisasi Penerimaan PAD (dalam ribu rupiah)	Hasil (%)	Keterangan
2020	2,577,865,836	329,693,262	12.79	Sangat Rendah
2021	2,570,037,776	315,304,009	12.27	Sangat Rendah
2022	2,587,693,433	358,048,104	13.84	Sangat Rendah
2023	3,572,891,836	339,095,873	9.49	Sangat Rendah
2024	2,722,520,810	372,152,619	13.67	Sangat Rendah

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Klaten selama tahun 2020–2024 masih tergolong sangat rendah, dengan nilai rasio hanya berada di kisaran 9,49% hingga 13,84%. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2022, sedangkan yang terendah pada tahun 2023. Jika dilihat dari pergerakannya, nilainya memang naik turun, tapi tidak banyak berubah. Sebagian besar masih berada di sekitar 10–13%.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten selama periode 2020–2024 mengalami kecenderungan meningkat, namun pergerakannya masih belum stabil. Fluktuasi yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan belum sepenuhnya kuat dan masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Artinya, meskipun secara nominal PAD bertambah, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan (Rahayu et al., 2023). Melihat struktur, komposisi PAD mengalami perubahan yang cukup jelas. Pergeseran dari dominasi lain-lain PAD yang sah menuju peningkatan peran pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan arah yang lebih baik, karena kedua komponen tersebut lebih mencerminkan aktivitas ekonomi daerah. Namun, perubahan yang terjadi belum sepenuhnya konsisten. Lonjakan kontribusi retribusi pada tahun 2024, misalnya, terlihat cukup drastis dan tidak bertahap, sehingga menimbulkan indikasi bahwa pengelolaan pendapatan masih bersifat reaktif dan belum didukung oleh basis ekonomi yang kuat. Perubahan kontribusi PAD yang tidak konsisten mengindikasikan adanya ketergantungan pada sumber pendapatan yang bersifat tidak tetap, sehingga struktur PAD cenderung fluktuatif dan belum berkelanjutan (Febrianti et al., 2025).

Jika dilihat dari kinerja pengelolaan, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara efektivitas, efisiensi, dan kemandirian. Tingginya rasio efektivitas yang selalu berada di atas 100 persen menunjukkan bahwa realisasi PAD mampu melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, kondisi ini perlu dipahami secara lebih kritis, karena bisa saja mencerminkan bahwa target yang disusun masih cenderung konservatif. Sementara itu, rasio efisiensi yang masih sangat tinggi menunjukkan bahwa pengeluaran daerah belum sebanding dengan kemampuan PAD, sehingga PAD belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Khoiriyah & Alliyah (2022) yang menjelaskan bahwa rendahnya efisiensi keuangan daerah mencerminkan ketidakseimbangan antara kapasitas pendapatan dan beban belanja daerah. Kondisi ini diperkuat dengan rendahnya tingkat kemandirian, di mana kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup besar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hapsari et al., (2025) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas yang terlalu tinggi tidak selalu menunjukkan kinerja optimal, tetapi dapat mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan target anggaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di satu sisi, pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan dengan baik, namun di sisi lain masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi, stabilitas struktur pendapatan, dan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, upaya ke depan tidak hanya perlu difokuskan pada peningkatan jumlah PAD, tetapi juga pada penguatan struktur pendapatan yang lebih stabil, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, serta pengurangan ketergantungan terhadap sumber pendapatan eksternal agar kemandirian keuangan daerah dapat tercapai secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten selama 2020–2024 cenderung meningkat, pergerakannya masih naik turun sehingga belum benar-benar stabil. Dari sisi struktur, memang sudah ada pergeseran ke arah pajak dan retribusi yang lebih mencerminkan aktivitas ekonomi daerah, tetapi perubahan tersebut belum konsisten dan masih terlihat “reaktif”, terutama dari lonjakan yang tidak bertahap. Dari sisi pengelolaan, kondisi yang muncul juga cukup kontras: PAD terlihat efektif karena selalu melampaui target, tetapi di sisi lain belum efisien dan belum mandiri karena pengeluaran masih jauh lebih besar dan ketergantungan pada dana dari pusat masih tinggi. Artinya, peningkatan PAD yang terjadi belum diikuti dengan perbaikan kualitas pengelolaannya. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa yang perlu diperbaiki bukan hanya jumlah PAD, tetapi juga bagaimana pendapatan itu dikelola agar lebih stabil, efisien, dan mampu menopang kebutuhan daerah sendiri.

Kedepan, pemerintah daerah perlu lebih fokus memperkuat sumber pendapatan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada dana eksternal, sementara penelitian selanjutnya bisa menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas dan kualitas PAD tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Klaten melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas dukungan pendanaan yang diberikan pada tahun 2025 sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten atas dukungan data dan informasi yang membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradilla, S. P., & Hanifa, N. (2024). Analisis Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi PAD dan Kemandirian Kota Surabaya. *INDEPENDENT : Journal of Economics*, 4, 98–104.
- Fathurrahman, Safitri, J., Munizu, M., & Nasir. (2024). Strategy for Optimizing Regional Original Income (PAD) Through Innovation and Collaboration in Central Lombok Regency. *Jurnal Bina Praja*, 347–359.
- Fauji, Z., & Syafitri, W. (2024). The impact of local governance and regional own-source revenue on economic growth at the district level in Indonesia regional fiscal autonomy in shaping economic outcomes at the district level . According to data from Central Agency of Statistics [Badan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 27(2), 153–174.
- Febriana, V. S., & Galuh, A. K. (2025). An Analysis of the Effectiveness and the Contribution of Local Taxes and Local User Fees on the Local Own-Source Revenue Improvement in East Java. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 4(2), 373–386.
- Febrianti, G., Silaban, K., Hotma, N., Sitanggang, U., Kemala, P., & Lubis, D. (2025). Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 : Tinjauan Desentralisasi dan Kemandirian Fiskal. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 2274–2280.
- Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P., Unia, R., & Umroh, Z. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran License. 3(2), 154–164.
- Hasanah, N., Masdar, R., & Furqan, A. C. (2025). Empirical Evidence on the Role of Local Own-Source Revenue in Strengthening Fiscal Independence of Indonesian Local Governments. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(2022), 2950–2962.
- Khoiriyah, M. Z., & Aliyah, S. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 22(2), 270–285.
- Oktaviani, E., & Marini, Y. (2023). Analysis of the Ratio of Independence, Effectiveness and Efficiency of Original Regional Revenue in the Garut Regency Financial Realization Report. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis (JIKABI)*, 2(2), 97–105. <https://doi.org/10.31289/jbi.v2i2.2964>
- Pattilouw, D. R. (2023). Performance Analysis of Regional Original Income in Maluku Province and its Optimization Strategy. *Journal of Economics and Business (JECOMBI)*, 3(2), 83–99.
- Poniatowicz, M., & Wildowicz-szumarska, A. (2024). The Increasing Importance of Intergovernmental Transfer Revenue in Local Finance in Poland and the Flypaper Effect. *Lex Localis - Journal Of Local Self-Government*, 22(3), 89–117.
- Rahayu, Y. W., Nugroho, T. R., Isnaini, N. F., & Hartono. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(4), 144–158.
- Riantisari, R., Putri, A. R., & Husna, F. K. (2025). Determinants of local government revenue and economic potential: Pathways for revenue enchancement. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 15(2), 312–322. <https://doi.org/10.12928/optimum.v15i2.14232>

- Rifa, A., & Ismunawan. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 685–692.
- Sartika, I., Yulsiati, H., & Febriantoko, J. (2025). The influence of own-source revenue, transfer funds, regional fiscal capacity, and capital expenditure on regional loans. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 4(2), 380–388.
- Saruni, Tiawon, H., & Hukom, A. (2025). The Effect of Tax Revenue Sharing Funds in Encouraging Fiscal Independence and Local Own- Source Revenue Growth. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 1959–1970. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4587>
- Shafwah, R., Masradin, & Mukhtar, A. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Jurnal Bisnis Net Volume*, 7(1), 282–289.
- Syahrimi, Hidayat, A., & Yulianita, A. (2025). Fiscal decentralization , monetary policy , and economic growth in Indonesia : A panel data analysis. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 13(4), 375–397. <https://doi.org/10.22437/ppd.v13i4.42111>
- Tuwaidan, G. K., Masinambow, V. A. J., Kawung, G. M. V, & Ratulangi, U. S. (2024). The Influence of Regional Own-Source Revenue , General Allocation Funds , Special Allocation Funds , and Capital Expenditure on Regional Financial Independence Through Economic Growth in North Sulawesi Province. *JISS: Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(12), 3134–3150.
- Warti, K., Suharto, R. B., & Roy, J. (2025). Effect of Regional Revenue and Balancing Funds on Regional Independence Moderated by Capital Expenditure in East Kalimantan. *JISS: Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(10), 3380–3396.
- Wibisono, N., Suprayitno, E., & Asnawi, N. (2024). The Influence of Original Local Government Revenue and Capital Expenditures on Economic Growth and Community Welfare. *Jurnal Ekonomi Pem*, 22(01), 1–14.
- Wijaya, E., Tuah, S. N., & Tiawon, H. (2025). Fiscal Independence and Effectiveness of Regional Revenue on Human Development Index : A Path Analysis 1713. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 1713–1724. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4491>
- Zakaria, R., & Syahputra, D. K. (2022). OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 47–59.
- Zarkasi, M. I. H., Khairi, H., & Wargadinata, E. L. (2024). Inequities Analysis In Local Own-Source Revenue Potential Between Regencies And Municipalities In Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(3).